

**LAPORAN PEMBUKAAN KETUA PANITIA
PADA RAPAT ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGURANGAN
RESIKO BENCANA
TANGGAL 22 MEI 2019**

**Yth. Bapak Sekretaris Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan;**

Yth. Sdr. Para Narasumber;

Yth. Sdr. Para Kepala Pelaksana BPBD Provinsi;

Yth. Sdr. Para Kepala Bappeda Provinsi;

Yth. Sdr. Para Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota;

Yth. Sdr. Para Kepala Bappeda Provinsi;

**Yth. Sdr. Para Undangan dan Peserta Rapat yang
Berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat-NYA kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul ditempat ini dalam rangka mengikuti:

**"RAPAT ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGURANGAN
RESIKO BENCANA"**

Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak/Ibu peserta rapat yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada hari ini.

Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan hadirin peserta rapat yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan **"Rapat Asistensi**

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana”, sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana adalah:

1. Srat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran **No. 360 - 299, tanggal 23 April 2019** tentang Pelaksanaan Kegiatan Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana.
2. Radiogram Nomor **T.005/2335/BAK tanggal 24 April 2019** tentang Undangan Rapat bagi peserta daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari penyelenggaraan Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana adalah untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah yaitu OPD yang menangani urusan penanggulangan bencana daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan OPD yang menangani urusan perencanaan dan penganggaran daerah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berbasis Pengurangan Resiko Bencana.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa bencana terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar. Pada pasal 18 undang-undang dimaksud bahwa perencanaan merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah terkait pelayanan dasar sebagaimana tercantum pada pasal 11 dan pasal 12 undang-undang dimaksud.

Pelaksanaan urusan pemerintah terkait pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kemudian pada pasal 298 dijelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah berpedoman pada Standar Teknis & Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. TUJUAN

Tujuan Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah khususnya OPD yang membidangi penanggulangan bencana daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) dan OPD yang menangani urusan perencanaan dan penganggaran daerah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berbasis pengurangan resiko bencana.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 258 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pembangunan daerah adalah “Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”. Peningkatan hasil pembangunan dirasakan/diterima oleh masyarakat ditentukan oleh kualitas APBD dan pengelolaannya. Kualitas anggaran ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan kualitas perencanaan ditentukan oleh sejauhmana dokumen perencanaan dapat memecahkan permasalahan dan menjawab isu strategis pembangunan.

C. NARASUMBER

Narasumber pada Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana, sebagai berikut:

NO.	NARASUMBER	MATERI
1	2	3
1	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Peran Kemendagri dalam Penanggulangan Bencana di Daerah
2	Plt. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri.	Kebijakan Nasional Perencanaan Program Penanggulangan Bencana Berbasis SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018.
3	Direktur Pengurang Resiko Bencana, BNPB	Kebijakan dan Strategi Pengurangan Resiko Bencana.
4	Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan, Bappenas	Perencanaan dan Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko Bencana Dalam Sustainable Development Goals(SDGs)
5	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah	Teknik Penyusunan Dokumen Penganggaran Program dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.
6	Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Dit. PEIPD, Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Teknis Penyusunan Program dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana di Dalam Dokumen Perencanaan Daerah

D. PESERTA RAPAT

Peserta rapat yang diundang adalah Kepala Pelaksana BPBD dari 17 Provinsi, Kepala Bappeda dari 17 Provinsi, Kepala Pelaksana BPBD dari 24 Kabupaten dan 16 Kota, Kepala Bappeda dari 24 Kabupaten dan 16 Kota terpilih sebagaimana tertuang dalam Radiogram Nomor T.005/2335/BAK tanggal 24 April 2019 tentang Undangan Rapat bagi peserta daerah.

E. TEMPAT DAN WAKTU.

Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana diselenggarakan pada tanggal 22 - 24 Mei 2019, bertempat di **Hotel Grand Mercure Cikini, Jakarta Pusat.**

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan dan atas nama Panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi "Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana". Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**JAKARTA, MEI 2019
KETUA PANITIA
PENYELENGGARA.**